

# MEMPERERAT *KOHESI SOSIAL* ANTAR ELEMEN BANGSA: REFLEKSI 57 TAHUN INDONESIA MERDEKA <sup>1</sup>

Romi Satria Wahono <sup>2</sup>

## MENENGOK KEMBALI KE BELAKANG

Merenungkan kembali perjalanan sejarah perjuangan rakyat Indonesia menuju kemerdekaan. Sebuah perjalanan berat untuk memulai babak baru kehidupan berbangsa dan bernegara, setelah ratusan tahun menjadi bangsa budak dan terjajah. 17 Agustus 1945, sebuah tonggak sejarah telah ditancapkan. Tonggak yang membawa implikasi bahwa bangsa Indonesia siap untuk berdiri sendiri, siap untuk duduk berdampingan dengan bangsa lain, dan siap dengan segenap elemen bangsa yang ada untuk menuju ke kehidupan yang lebih mapan.

Ujian kembali melanda bangsa Indonesia dengan belum berhasilnya membangun sebuah bangsa dengan *steady state* yang hakiki, boleh dikata sampai saat ini. Pada masa Soekarno elemen bangsa menjadi korban keegoisan suatu rezim yang terobsesi untuk bersikap revolusioner dan anti-kapitalisme yang berlebihan. Kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi tidak tenang, perekonomian ambruk, kehidupan masyarakat semrawut, masyarakat terbius masuk dalam pertikaian politik tanpa henti.

Pada masa Soeharto, rakyat kembali menjadi korban keganasan sebuah rezim yang keliru dalam merenungi hakekat *steady state* suatu bangsa. Mereka dipaksa untuk menikmati ketenangan hidup yang semu. Ketenangan hidup dengan penyunatan berbagai macam hak asasi manusia. Hak dalam berdemokrasi, hak dalam beragama, maupun hak memperoleh pendidikan politik yang sehat. Sistem ekonomi *trickle down effect* yang diarsiteki rezim orde baru ternyata tidak

efektif diimplementasikan di republik yang masih banyak penganut feodalisme garis keras. Pembesar dan orang kaya yang diberi keleluasaan, merasa tidak ada kewajiban memberikan bantuan untuk rakyat kecil dibawahnya. Akibatnya si kaya makin kaya, si miskin makin menderita.

Setelah itu kepemimpinan republik silih berganti, dari Habibie, Gus Dur dan saat ini Megawati. Borok-borok masa lalu belum juga berhasil disembuhkan. Kalau tidak mau disebut malah menambahi borok dengan penyakit lain yang lebih dahsyat. Mengobati penyakit korupsi dengan korupsi baru, menambal nepotisme dengan nepotisme baru, kolusi, kongkalikong, kasak-kusuk dan *lip service* untuk menipu rakyat yang semakin menjadi-jadi.

Menengok kembali hasil perjuangan panjang reformasi total (*total reform*) yang digulirkan mahasiswa yang bergerak pada tahun 1998. Hasil dan klasemen sementara saat ini adalah berubahnya peta kekuasaan, naik peringkatnya kekuasaan legislatif diatas eksekutif. Mudah-mudahan ini bukan hakekat reformasi yang kita inginkan, namun hanyalah awal dari suatu proses panjang menuju ke arah perbaikan nasib bangsa dari keterpurukan yang berlarut-larut.

## RENGGANGNYA KOHESI SOSIAL

Beberapa inti permasalahan yang ingin saya angkat adalah tentang masalah renggangnya *kohesi sosial* (*social cohesion*, kerekatan sosial) dikarenakan jiwa feodalisme yang masih mendarah daging di kalangan rakyat Indonesia. Menjauhnya sang pejabat atau si kaya dari orang yang ada dibawahnya. Dengan kata lain *kohesi sosial* diantara elemen-elemen bangsa ini semakin lama semakin merenggang, baik *kohesi sosial* dalam perspektif horizontal maupun vertikal.

---

<sup>1</sup> Disampaikan pada Seminar Menyambut 57 Tahun Indonesia Merdeka, Tokyo, Jepang, 17 Agustus 2002.

<sup>2</sup> Penulis, Ketua Umum PPI Jepang

Ada pengamat yang menilai bahwa kita kejatuhan nasib buruk mendapatkan warisan feodalisme jaman kerajaan. Pada masa itu raja-raja dan bupati-bupati Jawa menguasai dengan penuh penduduk dan juga tanah pertanian. Rakyat kecil tak punya hak atas tanah, mereka hanya sebagai buruh dan budak. Bupati memaksa rakyat bekerja keras untuk menyenangkan sang raja dengan upeti berlimpah, sehingga kedudukannya tetap terlindungi. Sikap arogan, menjilat, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sudah mendarah daging berabad-abad lamanya, membuat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) susah diberantas di republik tercinta ini.

Di lain pihak, jargon *kohesi sosial* dalam perspektif vertikal (perjuangan rakyat kecil melawan penguasa *dhalim*), kadang-kadang dijadikan isu sesaat sebagai batu loncatan ke panggung kekuasaan, kemudian dilupakan sama sekali. Penggagas teori *the loser democracy policy* patut berbangga diri, karena ternyata teorinya laku dipraktikkan di Indonesia. Orang-orang yang kalah dan ada di bawah berteriak-teriak untuk mewujudkan demokrasi dan pemerintan yang bersih, tetapi setelah mendapatkan kekuasaan malah meniru atau mencontoh orang atau pemerintahan yang dulu dikritiknya. Tokoh-tokoh bangsa yang mengklaim diri pendukung berat demokrasi, ataupun menempeli nama partainya dengan jargon demokrasi pun tetap gemar memakai teori ini.

Banyak analisa tentang *kohesi sosial* dengan perspektif horizontal, dimana yang diutamakan adalah mengenai manajemen konflik antar masyarakat [Malley-2000] [Siddique-2000]. Mengamati kondisi Indonesia, sebenarnya konflik horizontal antar elemen masyarakat bukan hanya disebabkan oleh *kohesi sosial* dalam perspektif horizontal yang renggang. Bergolaknya daerah (aceh, papua, maluku, poso, dsb.) saya pikir lebih banyak disebabkan masalah rendahnya kohesi sosial dalam perspektif vertikal. Masalah pemimpin yang "lupa" akan janjinya, masalah pemimpin yang "telmi" (telat mikir) terhadap keinginan rakyatnya,

pemimpin yang lebih memikirkan bagaimana mempertahankan kekuasaan daripada bagaimana mensejahterakan rakyat, dan pemimpin yang terlalu luas kekuasaannya.

#### *STEADY STATE* SEBUAH MIMPIKAH

Sebuah republik dengan *steady state* (masyarakat adil, makmur, tenang, tentram dan sejahtera) bukanlah hanya mimpi, namun merupakan sesuatu yang nampak di depan mata, asal ada usaha maksimal untuk mewujudkannya

Tidak ada alasan bangsa indonesia tidak bisa bangkit dari keterpurukan, dengan kekayaan alam yang berlimpah ruah, 17 ribu lebih pulau-pulau yang berserakan di tanah air, dan juga sumber daya manusia (SDM) yang malang melintang di seluruh dunia (ingat *human capital theory*). Mudah-mudahan kita tidak menjadi tikus yang mati dilumbang padi.

#### MEMPERERAT *KOHESI SOSIAL*

Pada bagian akhir abstraksi pemikiran ini, saya mencoba merangkum sebuah usulan tentang beberapa beberapa usaha untuk mempererat *kohesi sosial* anak bangsa.

#### *Sosialisasi Filosofi Jabatan adalah Amanah dan Bukan Hadiah*

Mempertinggi kesadaran terhadap filosofi jabatan adalah sebuah beban yang harus dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan, bukan nikmat yang diperoleh tanpa tuntutan. Lebih pas kalau kita melakukan "istighfaran", bukan malah "syukuran" saat mendapatkan amanah menjadi pejabat atau pemimpin.

#### *Memperbaiki Akhlak dan Moral Terhadap Orang di Sekitar Kita*

Marilah jujur terhadap diri sendiri, sudahkah kita memandang dan memperlakukan orang disekitar kita dalam kedudukan yang sama dan sederajat ? Apakah berkurang senyum kita apabila berbicara dengan bawahan kita ? Apakah bertambah senyum kita apabila bertemu dengan atasan kita ? Apakah kita sudah saling tolong diantara teman kita ? Atau apakah kita malah saling tendang dan timpuk diantara kita?

Hakekat apa yang ingin saya ungkapkan disini adalah senada dengan apa yang Shopie Bessis rangkumkan dalam suatu tulisan menarik berjudul *from social exclusion to social cohesion* [Bessis-1996]. Yaitu ajakan untuk menuju kerekatan sosial diantara elemen bangsa tanpa pandang bulu, dari abang becak sampai menteri atau presiden.

#### *Mengakhiri Kebijakan yang Berimplikasi ke Kepenatan Birokrasi*

Trenyuh mendengar cerita tentang dosen-dosen muda di sebuah universitas negeri, yang harus antri berjam-jam mengambil gaji, sementara atasan-atasan mereka menari-nari tanpa antri. Setelah mereka duduk diatas, apa sudah lupa dulu semasa muda pernah berkata, "Akan aku akhiri kebijakan dan birokrasi seperti ini!".

Secara keseluruhan (terutama rakyat kecil) bangsa Indonesia menderita *kepenatan birokrasi*. Merindukan mudahnya birokrasi di Jepang (kepengurusan KTP, SIM, asuransi kesehatan, surat-surat kependudukan, VISA, university transcript record, dsb.) terimplementasikan di Indonesia. Rakyat Indonesia bukannya tidak mampu, tapi ada oknum yang masih menikmati renggangnya *kohesi sosial*, dan menikmati kehidupan feodal. Dimana dia bisa memanfaatkan gap kaya-miskin yang besar untuk keperluan diri dan kelompoknya sendiri.

#### *Bangun Suasana Keterbukaan Atas Bawah*

Saya tertarik dengan apa yang disampaikan Lord Acton: *power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely*. Dulu saya anggap ungkapan John Emerich Edward Dahlberg Acton (Lord Acton) ini hanya retorika politik belaka, namun setelah saya resapi maknanya, saya yakin bahwa di satu sisi ungkapan Lord Action itu ada benarnya. Sikap *corrupt* itu bisa timbul tidak hanya dipengaruhi faktor internal, tapi juga faktor eksternal. Kalau kita amati lebih jauh, filosofi ini dipraktikkan masyarakat Jepang dengan suasana perkantoran yang terbuka. Atasan duduk dalam satu ruangan besar bersama para staf dan bawahannya. Sehingga niat korupsi lenyap karena malu terlihat orang banyak.

#### *Menjaga Gerbong Tulus Perubahan Bangsa*

Sejarah membuktikan bahwa gerbong dan agen perubahan ke arah perbaikan bangsa adalah adanya gerakan mahasiswa. Jatuhnya dua penguasa tiran di republik ini ataupun terbongkarnya selingkuh politisi-politisi bermoral rendah pun tak bisa dilepaskan dari peran mahasiswa. Menjaga ketulusan gerbong perubahan ini adalah tugas kita semua. Jangan sampai gerakan mahasiswa jadi terbeli. Dan jangan sampai mahasiswa kehilangan *sense of crisis* ataupun *kohesi sosial* dengan rakyat kecil, karena terlalu asyik menggauli buku-buku dan alat-alat penelitian.

#### REFERENSI

- [Malley-2000] Michael Malley, *Social Cohesion and Conflict Management in Indonesia*, Asian Regional Consultation on Social Cohesion and Conflict Management, Manila, Philippines, March 2000.
- [Siddique-2000] Sharon Siddique, *Social Cohesion and Social Conflict in Southeast Asia*, Asian Regional Consultation on Social Cohesion and Conflict Management, Manila, Philippines, March 2000.
- [Bessis-1995] Sophie Bessis, *From social exclusion to social cohesion: towards a policy agenda*, The Roskilde Symposium, Management of Social Transformations, March 1995.

#### BIOGRAFI PENULIS



**Romi Satria Wahono.** Menyelesaikan program S1 (B.Eng) dan S2 (M.Eng) pada jurusan computer science di Saitama University, Jepang pada tahun 1999 dan 2001. Saat ini sedang menyelesaikan program PhD pada jurusan dan universitas yang sama. Datang ke Jepang tahun 1994 dengan berstatus sebagai peneliti pada instansi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Diberi amanah untuk duduk sebagai Ketua Umum Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang (PPI Jepang) periode tahun 2001-2003. Penelitian yang dilakukan saat ini adalah seputar bidang software engineering dan requirements engineering. Informasi lebih lanjut tentang penulis bisa didapat pada URL dan email dibawah:

URL: <http://romisatriawahono.net>

Email: [romi@romisatriawahono.net](mailto:romi@romisatriawahono.net)